

Kajian Distribusi Pemasaran dan Harga Pokok Produksi Karet Rakyat di Kalimantan Selatan

M. Nordiansyah¹, Kadir², Doni Stiadi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telp./Fax (0511) 3304595, 3304968 , mnordiansyah@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to study on marketing distribution and analyze cost of rubber production in South Kalimantan Province. The research focused to farmers in Balangan Regency.

Research showed that the marketing distribution of rubber from farmers to factories went through several stages. The rubber is sold by farmers to small collectors, small collectors sell to large collectors, large collectors sell rubber to the factory. Farmers have not calculated the cost of production of rubber. The selling price does not consider the cost, it based on the market price. Farmers still sell the rubber to the collectors, when the price decrease. Cost calculation analysis is needed to find out how the actual costs incurred by farmers in an effort to produce rubber. So it is known how much is actually a decent price for farmers to sell rubber. During 2017, the selling price of rubber decreased, below the cost of production at the farmer.

Keywords: Cost of product, Rubber, Production

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kedua penghasil karet terbesar di dunia setelah Thailand dan diurutkan ketiga Malaysia. Namun seiring perkembangannya, produsen karet di dunia semakin bertambah sehingga menambah saingan pemasok karet dunia. Perkebunan karet merupakan unggulan di Kabupaten Balangan. Tercatat di tahun 2015 luas tanaman muda 12.704 Ha, tanaman menghasilkan 23.953 Ha dan tanaman rusak 898 Ha, sedangkan produksi karet adalah 24.959 Ton, produksi tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,96%. Kecamatan dengan produksi karet terbesar adalah di Kecamatan Awayan dan Kecamatan Paringin (BPS, 2016).

Secara spesifik, permasalahan pengembangan perkebunan karet di Kabupaten Balangan yaitu a) Keterbatasan areal lahan pengembangan dan tumpang tindih lahan, b) Banyaknya tanaman karet tua dan Peremajaan yang dilakukan oleh petani belum semuanya menggunakan klon baru dan terbaik c) Rendahnya komitmen terhadap upaya peningkatan mutu hasil, d) Lokasi kebun karet rakyat masih sulit terjangkau transportasi kendaraan bermotor sehingga menghambat pemasaran, e) SDM dalam pengelolaan agribisnis karet masih relatif rendah, f) Masih

sulitnya petani dalam mengakses modal, g) Masih belum banyaknya tersedia pasar lelang karet h) Industri yang mengolah karet alam menjadi produk karet jadi masih sangat sedikit. (Wardhana, dkk, 2011).

Sebagaimana diinformasikan oleh kompasiana, harga karet rendah disebabkan karena terlalu panjangnya mata rantai distribusi tataniaga karet. Di sinilah perlu peran Pemerintah Daerah, terutama Kepala Daerah. Apakah mereka bisa melakukan terobosan baru dalam memajukan daerahnya. Semua biaya operasional, pungutan resmi atau tidak, (banyaknya sumbangan yang diminta aparat kepada pengusaha karet sering dijadikan alasan untuk memainkan harga karet) yang dikeluarkan pedagang di semua tingkatan, pada akhirnya dibebankan kepada petani.

Sementara itu untuk kualitas dan pengolahan bahan olahan karet sendiri beberapa kendala yang dihadapi oleh petani adalah: 1) Kadar air dibiarkan tinggi bahkan sering sengaja direndam dalam air, 2) Meluasnya penggunaan bahan pembeku lateks yang tidak direkomendasikan di kalangan petani antara lain pupuk TSP, tawas, gadung, perasan nanas, cuka para, 3) Terkontaminasi nya bahan olahan karet dengan tanah, lumpur, pasir, tatal, serat, 4) Jenis dan ukuran bahan olahan karet yang

beragam dari yang tipis hingga berbentuk bantal, dan 5) Lemahnya persatuan petani baik dalam usaha pengolahan maupun pemasaran. Ke semua hal tersebut merupakan faktor penghambat dalam upaya memperbaiki mutu bahan olahan karet. Sehingga menimbulkan dampak yaitu: 1) Membengkaknya biaya pengolahan/ pembersihan di pabrik, 2) Tambahan biaya ini, umumnya dibebankan kepada petani; lebih jauh berpotensi menurunkan daya saing produk di luar negeri, 3) Meningkatnya limbah kotoran padat & cair berpotensi mengganggu lingkungan hidup, 4) Terganggunya mutu produk karet ekspor, berpotensi merusak citra perkaretan Indonesia serta mengganggu keberlanjutan kinerja ekspor karet ke luar negeri.

Secara umum strategi untuk meningkatkan harga jual karet dan kesejahteraan petani/penyadap adalah dengan a) membuat regulasi/kebijakan inovatif misalnya mendirikan badan usaha milik daerah khusus karet, membuat kebijakan khusus karet, b) meningkatkan penggunaan karet alam untuk kepentingan industry, c) meningkatkan kualitas karet, d) peremajaan tanaman karet, e) memberikan bantuan/pinjaman lunak, f) membuat usaha sampingan untuk petani karet, g) membangun komitmen.

Pengembangan agribisnis karet menjadi perlu dengan asumsi eksternal a) permintaan karet dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak, semakin mahal harga karet sintesis dan kesadaran kelestarian lingkungan semakin meningkat, b) produksi karet rakyat diperkirakan semakin meningkat sementara Indonesia salah satu produsen terbesar karet, c) selain produk lateks, kayu karet juga berpotensi untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal tersebut pengembangan produksi karet di Kabupaten Balangan direncanakan dengan a) konsistensi mengacu pada revitalisasi perkebunan b) karet diarahkan menjadi usaha agribisnis yang berbasis lateks dan kayu yang berdaya saing tinggi, c) perluasan areal namun harus tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, d) peremajaan tanaman dengan klon baru, klon karet unggul dengan potensi produksi lateks lebih dari 3 ton per ha per tahun dan kayu karet yang nantinya dihasilkan 1 m³ pohon e) pencegahan alih fungsi lahan-lahan perkebunan karet ke non pertanian, f) membangun dan memperbaiki prasarana jalan yang membantu kelancaran transportasi, g) pengembangan

sumberdaya manusia yang mampu mengelola dan meneruskan usaha pengembangan karet, h) perbaikan teknologi penyadapan dan pengolahan hasil i) akses permodalan melalui berbagai skim kredit termasuk pola syariah. Untuk ini perlu bantuan sertifikasi lahan petani secara masal untuk agunan j) pengembangan agribisnis hulu untuk perkebunan karet, k) pendirian pasar lelang karet di wilayah sentra, dan l) memfasilitasi kerjasama yang sinergi antara kelompok tani, pemerintah dan swasta (*public private partnership*) dalam pemasaran.

Selama ini hasil karet dipasarkan kepada pengepul, yang kemudian memasok ke pabrik di Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Wacana pembangunan pabrik pengolahan karet sudah pernah diinisiasi dari tahun 2008, namun pada perjalanannya belum bisa diwujudkan karena apabila Balangan memiliki pabrik karet, akan mengganggu *supply* bahan baku ke pabrik lain di sekitar Balangan, sehingga gabungan pengusaha karet belum bisa memberikan izin pembangunannya. Padahal manfaat didirikannya pabrik karet tidak lain adalah untuk menstabilkan harga jual karet dan memotivasi petani untuk menghasilkan bahan olahan karet yang bermutu.

Mempertimbangkan prospek agribisnis karet, perlu dibentuknya suatu badan usaha khusus karet, dan peluang pembangunan pabrik pengolahan karet di Balangan, Pemerintah Kabupaten Balangan menjadikan rencana pendirian perusahaan daerah pengolahan karet sebagai salah satu solusi pemecahan permasalahan mutu, pengolahan dan pemasaran karet dan tidak lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani karet.

Permasalahan yang juga muncul dalam lingkup petani rakyat mengenai penetapan harga pokok produksi karet yaitu mengenai laporan perhitungan tentang biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dalam suatu periode. Untuk memperoleh informasi biaya produksi tersebut dibutuhkan pengolahan data sesuai teori serta prinsip akuntansi, sehingga dapat juga digunakan dalam penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) yang tepat.

“Penentuan HPP menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjadi hal yang menentukan pendapatan para pelaku usaha kerana berkaitan dengan laba yang akan diperoleh perusahaan. Komponen pembentukan laba adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi dan jasa yang

dihasilkan. Sedangkan biaya adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang dan jasa. Biaya tersebut disebut sebagai biaya harga pokok atau harga pokok produksi” (Mulyadi, 2000).

Menurut (Hansen and Mowen, 2006), “Harga pokok produksi merupakan jumlah biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead*.”

Untuk menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan harus tepat dan akurat sehingga biaya-biaya yang ada atau dikeluarkan dalam proses produksi akan menunjukkan harga pokok sesungguhnya. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah mengetahui berapa besarnya biaya berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai.

Penentuan harga pokok sangat penting dalam usaha perkebunan karet, karena memberikan perlindungan dalam perolehan harga jual karet produksi petani rakyat yang wajar sesuai dengan nilai yang diharapkan selama ini serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik karet.

Adapun tujuan penentuan harga pokok produksi yang lain (Akbar, 2011), diantaranya yakni :

1. Sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan.
2. Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan.
3. Sebagai dasar penilaian bagi penyusun neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva.
4. Sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual terhadap konsumen.
5. Menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan produk jadi.
6. Untuk menghitung harga pokok produksi dalam laporan laba rugi perusahaan.
7. Sebagai evaluasi hasil kerja.
8. Pengawasan terhadap efisiensi biaya, terutama biaya produksi.
9. Sebagai dasar pengambilan keputusan.
10. Untuk tujuan perencanaan laba.

Menurut Mulyadi (2005:14) “Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual”.

Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan tergantung pada sistem manajemen yaitu mengefisienkan segala biaya-biaya produksi yang dikeluarkan. Rendahnya biaya produksi adalah salah satu dari indicator terciptanya efisiensi dalam pengelolaan tanaman karet.

Penelitian ini mencoba menguji penetapan harga karet di Balangan, harga yang ditetapkan oleh pedagang apakah akan terbukti melindungi petani karet rakyat.

2. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana distribusi pemasaran karet yang dihasilkan oleh petani
- b) Komponen biaya apa saja yang termasuk dalam HPP Karet Rakyat?

3. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan penerapan pedoman penetapan harga pokok produksi karet rakyat yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan kalangan petani rakyat. Secara khusus, tujuan penelitian adalah menganalisis :

- a) Distribusi pemasaran karet yang dihasilkan oleh petani
- b) Penentuan harga pokok produksi karet oleh petani

4. Manfaat Penelitian

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai distribusi pemasaran karet yang dihasilkan oleh petani
- 2) Dapat memberi tambahan informasi bagi para petani karet yang ingin memperoleh tambahan wawasan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi biaya (penetapan harga pokok produksi).
- 3) Memberikan pengetahuan bagi para petani karet mengenai penetapan harga pokok produksi secara baik dan benar.
- 4) Memberikan saran perbaikan kepada para petani karet rakyat dalam penetapan HPP, sehingga dapat meyakinkan akan peningkatan kinerja dan dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi para petani karet.

5. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Biaya

Pemahaman mengenai biaya penting sekali karena penerapan biaya yang tepat dapat digunakan untuk membantu proses perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan ekonomi.

“Biaya dibagi atas dua yaitu biaya dalam arti luas dan biaya dalam arti sempit. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, biaya diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.” (Mulyadi, 2007).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya sebagai suatu pengorbanan atas sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu ertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya sebagai suatu pengorbanan atas sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat pada saat ini atau pada masa yang akan datang (pendapatan).

Penggolongan Biaya

Menurut Mulyadi, 2007 : ada beberapa cara penggolongan biaya yang sering dilakukan, antara lain penggolongan biaya atas dasar fungsi pokok dalam perusahaan. Pada perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu di dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Biaya produksi

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut yang diolah dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat diidentifikasi secara langsung terhadap produk tertentu. Sedangkan biaya *overhead* pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.

2. Biaya Pemasaran

Biaya Pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk, contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya perjalanan

dinas, biaya gaji manajer pemasaran dan lain-lain.

3. Biaya Administrasi dan Umum

Merupakan biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya telepon, biaya peralatan kantor dan lain-lainnya.

Harga Pokok Produksi

Harga pokok produksi atau *products cost* merupakan elemen penting untuk menilai keberhasilan (*performance*) dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Unsur-unsur harga pokok produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik.

Menurut (Hansen and Mowen, 2006) : “ Harga pokok produksi merupakan jumlah biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead*”.

Manfaat informasi harga pokok produksi menurut (Mulyadi, 2007) : 1. Menentukan harga jual produk, 2. Memantau realisasi biaya produksi, 3. Menghitung laba rugi periodik, Menentukan harga pokok persewaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.

Metode Penentuan Harga Pokok

Menurut Mulyadi (2007:18) metode penentuan harga pokok produk adalah menghitung semua unsur biaya kerja dalam harga pokok produksi. Ada dua jenis metode dalam membebankan biaya ke produk. Kedua jenis tersebut adalah :

1. Metode penentuan harga pokok pesanan (*job order costing*)

2. Metode penentuan harga pokok proses.

Ketidaktepatan dalam perhitungan harga pokok produksi membawa dampak yang merugikan bagi perusahaan, karena harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan laba, sebagai alat untuk mengukur efisiensi pelaksanaan proses produksi serta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan. Oleh karena itu, muncul metode baru dalam perhitungan harga pokok produksi, yaitu :

1. Metode *Activity Based Costing (ABC) System*

Activity Based Costing (ABC) System merupakan metode perbaikan dari sistem tradisional. *Activity Based Costing (ABC)*

System ini merupakan metode perhitungan biaya yang dapat memberikan alokasi biaya *overhead* pabrik yang lebih akurat dan relevan. Pada metode ini, seluruh biaya tidak langsung dikelompokkan sesuai dengan aktivitas biaya masing-masing, kemudian masing-masing kelompok biaya (*cost pool*) tersebut dihubungkan dengan masing-masing aktivitas dan dialokasikan berdasar aktivitasnya masing-masing. Dasar alokasi yang digunakan adalah jumlah aktivitas dalam setiap *cost pool* tersebut.

2. Metode *Full Costing*

Full Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik yang berperilaku variabel maupun tetap.

3. Metode *Variable Costing*

Variable Costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik variabel.

Metode *full costing* maupun *variable costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi. Menurut (Subagyo, 2006) perbedaan metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang berperilaku tetap. Dalam *full costing* biaya *overhead* pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk atas dasar biaya *overhead* pabrik sesungguhnya. Sedangkan dalam metode *variable costing*, biaya *overhead* pabrik yang dibebankan kepada produk hanya biaya yang berperilaku saja.

6. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang lebih luas. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pemerintah Kabupaten Balangan. Penentuan obyek penelitian ini menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu sendiri, dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. Penentuan obyek penelitian berdasarkan tujuan, adalah “memilih kasus yang kaya informasi untuk diteliti secara mendalam” (McMillan dan Schumacher, 2001:169). Hal ini dapat dipahami karena kekuatan dari penelitian kualitatif terletak pada kekayaan informasi yang dimiliki responden, dari kasus yang diteliti, dan kemampuan analitis peneliti. Sehingga penentuan sampel dalam penelitian kualitatif disesuaikan dengan tujuan penelitian, masalah penelitian, teknik pengumpulan data, dan keberadaan kasus yang kaya akan informasi (atau oleh kecukupan informasi yang diperoleh). Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah petani karet. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah petani karet yang ada di Kabupaten Balangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan ddalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Jenis data kuantitatif yang digunakan adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama berupa angka-angka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2010:137) “mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram, atau mengenai topik penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi dan wawancara.

Menurut (Suharsimi, 1998) metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan

penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan seperti: catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Sedangkan metode wawancara atau sering dikenal dengan istilah *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh data tentang variabel, perhatian, sikap terhadap sesuatu (Suharsimi, 1996).

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari: (1) Penelitian kepustakaan / dokumentasi (*library research*) dan (2) Penelitian Lapangan (*field research*), melalui observasi dan wawancara (pengamatan).

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengembangkan berbagai ukuran yang relevan dengan metode/teknik analisis data, dengan cara :

1. Menganalisis harga karet rakyat yang terjadi.
2. Menganalisis harga karet yang dihitung berdasarkan teori akuntansi biaya.

Teknik analisis dalam hal penentuan komponen harga pokok produksi dengan menggunakan metode *full costing*. *Full Costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Harga pokok produksi menurut metode *full costing* terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut :

Persediaan Awal	xxx
By. Bahan Baku	xxx
By. Tenaga Kerja langsung	xxx
By. <i>overhead</i> pabrik variabel	xxx
By. <i>overhead</i> pabrik tetap	xxx +
Total Biaya Produksi	xxx
Persediaan Akhir	(xxx)
Harga Pokok Produksi	xxx

3. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan *full costing* terdiri dari unsur biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum).

4. Mereviu hasil analisis perbandingan antara kedua perhitungan harga karet
5. Menginterpretasikan hasil analisis untuk dibuatkan kesimpulan.

Definisi Operasional

Definisi harga pokok produksi secara umum adalah jumlah biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan ke barang yang diselesaikan adalah biaya produksi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan biaya *overhead*. Adapun pengertian biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau *revenue* yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

7. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Balangan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, bagian selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Luas Wilayah Kabupaten Balangan

Kabupaten Balangan memiliki wilayah seluas 1.878,30 km² terbagi menjadi 8 kecamatan dengan 157 desa. Lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Balangan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas (Km2)	%
1	Lampihong	96,96	5,16
2	Batu Mandi	147,96	7,88
3	Awayan	142,57	7,59
4	Tebing Tinggi	257,25	13,70
5	Paringin	100,04	5,53
6	Paringin Selatan	86,80	4,62
7	Juai	368,88	20,59
8	Halong	659,84	35,13
	Balangan	1.878,30	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Balangan (2016)

Penduduk Kabupaten Balangan

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan hasil proyeksi penduduk tahun 2016 adalah 125.534 jiwa yang terdiri dari 63 219 laki-laki dan 62 315 perempuan. Dengan luas wilayah 1.878,30 km², Balangan memiliki rata-rata kepadatan penduduk 66 orang per kilometer persegi. Dua kecamatan terpadat di Kabupaten Balangan antara lain Kecamatan Paringin dan Lampihong dengan kepadatan penduduk masing-masing 185 dan 176 orang per km². Adapun kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi, Halong, dan Juai dimana tingkat kepadatannya lebih rendah daripada angka kepadatan rata-rata Kabupaten Balangan.

Kondisi Perekonomian Kabupaten Balangan

Pengeluaran penduduk dicatat dalam segala aspek, dari konsumsi makanan, non-makanan, dan aneka transaksi keuangan. Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Balangan di tahun 2015 paling besar di kelompok Rp 500.000,- hingga Rp750.000,- perbulan dengan persentase sebanyak 35,20% dari total penduduk Balangan. Walaupun masih tercatat ada 1,84% penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah angka Rp300.000,- per bulannya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB disini menggunakan pendekatan produksi yaitu nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Struktur ekonomi suatu daerah diukur dari peran masing-masing sektor/lapangan usaha terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta di suatu sektor ekonomi akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.

Struktur ekonomi Kabupaten Balangan masih dikuasai oleh kategori lapangan usaha primer yakni kategori pertanian dan kategori

pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2015, kategori ini mampu memberikan kontribusi sampai dengan 76,78%, dimana andil terbesar didominasi oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 65,30%. Kontribusi terkecil diberikan oleh kategori pengadaan listrik dan gas dimana hanya mampu menyumbangkan 0,02% terhadap total PDRB (dengan minyak bumi dan pertambangan batu bara) atas dasar harga berlaku.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Table 2. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2016 (juta Rp)

NO	Lapangan Usaha	2014		2015*		2016**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.008.057,36	10,78	1.097.515,56	11,81	1.166.053,40	12,36
B	Pertambangan dan Penggalian	6.432.466,50	68,78	6.014.298,42	64,72	5.859.618,37	62,11
C	Industri Pengolahan	142.356,75	1,52	161.040,52	1,73	180.255,11	1,91
D	Pengadaan Listrik, Gas	1.574,99	0,02	2.327,26	0,03	2.926,25	0,03
E	Pengadaan Air	18.099,75	0,19	19.887,77	0,21	21.567,35	0,23
F	Konstruksi	327.495,02	3,50	376.382,88	4,05	411.386,48	4,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	385.723,50	4,12	430.612,23	4,63	489.025,64	5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	142.074,68	1,52	159.226,70	1,71	175.319,26	1,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24.360,21	0,26	27.253,99	0,29	29.695,13	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	104.492,02	1,12	112.070,58	1,21	120.700,01	1,28
K	Jasa Keuangan	22.115,39	0,24	24.336,33	0,26	27.417,05	0,29
L	Real Estate	73.751,97	0,79	80.484,47	0,87	86.923,23	0,92
M,N	Jasa Perusahaan	4.910,33	0,05	5.577,36	0,06	6.162,99	0,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	341.184,63	3,65	404.951,08	4,36	424.978,03	4,50
P	Jasa Pendidikan	224.435,49	2,40	262.424,08	2,82	303.296,63	3,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61.416,78	0,66	71.557,01	0,77	80.052,76	0,85
R,S, T,U	Jasa lainnya	37.123,19	0,40	43.266,80	0,47	48.292,46	0,51
	PDRB	9.351.638,56	100	9.293.213,04	100	9.433.670,14	100

*Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2017

Dilihat dari lapangan usaha, Kabupaten Balangan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu (1) pertambangan dan penggalian, (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan dan (3) perdagangan besar dan eceran, dan reparasi

mobil dan sepeda motor. Tahun 2016 menunjukkan bahwa kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 62,11% (turun dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014), pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,36% (naik dibandingkan tahun 2015 dan 2014), dan perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,18% (naik dibandingkan tahun 2015 dan 2014).

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Balangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat selama tahun 2011-2015. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan tahun 2011 sampai 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2015 (persen)

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,99	2,68	3,44	4,06	4,45
2	Pertambangan dan Penggalian	10,30	7,63	9,34	6,45	1,94
3	Industri Pengolahan	5,17	5,22	5,20	4,74	4,67
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,61	8,50	2,61	12,99	16,70
5	Pengadaan Air	5,14	3,82	3,73	6,48	4,57
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,01	6,05	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,48	5,81	6,13	4,33	6,94
8	Transportasi dan Pergudangan	6,56	6,45	6,79	6,54	5,76
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,76	5,28	8,43	5,12	4,59
10	Informasi dan Komunikasi	3,64	3,15	3,46	4,95	5,39
11	Jasa Keuangan	16,77	3,51	6,25	5,43	4,33
12	Real Estate	7,87	7,81	9,10	5,34	5,03
13	Jasa Perusahaan	4,40	5,43	7,89	7,54	7,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	5,90	5,69	5,54	8,71
15	Jasa Pendidikan	4,09	5,46	6,07	6,21	9,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	6,02	7,24	5,74	6,17
17	Jasa lainnya	7,36	5,35	3,64	5,78	6,34
	PDRB dengan Pertambangan Minyak Bumi dan Batu Bara	8,84	6,69	8,04	6,01	3,12
	PDRB tanpa subkategori pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Batubara dan Lignit, dan Bijih Logam	5,72	4,60	5,05	4,97	5,97

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, Tahun 2016

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan cenderung melambat di tahun 2012 yaitu sebesar 6,69% dan tahun 2014 sebesar 6,01% hingga tahun 2015 sebesar 3,12%. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai tambah bruto pada kategori lapangan usaha yang cukup dominan di Balangan, yakni kategori pertambangan dan penggalian. Subkategori pertambangan batu bara sangat berperan dalam kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Kontribusi subkategori pertambangan yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Balangan.

Perkebunan Karet di Kabupaten Balangan

Luas tanaman dan produksi karet di Kabupaten Balangan tahun 2012-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Luas Tanaman dan Produksi Karet di Kabupaten Balangan Tahun 2012-2015

No	Kecamatan	Tahun							
		2012		2013		2014		2015	
		Luas Tanaman	Produksi	Luas Tanaman	Produksi	Luas Tanaman	Produksi	Luas Tanaman	Produksi
1	Lampihong	2.232	1.130	2.304	1.132	2.194	1.132	2.142	1.132
2	Batu Mandi	6.444	4.409	6.569	4.485	6.839	4.495	6.798	4.465
3	Awayan	7.377	5.904	7.497	5.353	7.366	5.357	7.321	5.353
4	Tebing Tinggi	4.531	3.156	4.574	2.860	4.412	2.860	4.373	2.860
5	Paringin	5.753	5.276	5.810	4.746	5.711	4.786	5.675	4.546
6	Paringin Selatan	3.091	2.112	3.142	1.918	3.019	1.978	2.968	1.915
7	Juai	3.167	1.820	3.289	1.921	3.280	1.952	3.232	1.921
8	Halong	4.677	3.032	4.897	2.867	5.079	2.897	5.035	2.767
	Balangan	37.272	26.839	38.082	5.282	37.900	25.457	37.544	24.959

Sumber : Kabupaten Balangan

Berdasarkan data dalam tabel tersebut atas diketahui bahwa Awayan dan kecamatan Batu Mandi memiliki luas tanaman tertinggi di antara kecamatan lainnya di kabupaten Balangan. Kemudian secara keseluruhan luas tanaman karet pada tahun 2015 tercatat seluas 37.544 Ha.

Dilihat pada aspek produksi perkebunan karet di Kabupaten Balangan mengalami penurunan yaitu 26.836 ton tahun 2012 dan pada tahun 2015 produksinya menjadi 24.959 ton.

Banyak pihak yang terlibat dalam jalur tata niaga karet alam, mulai petani, tengkulak, KUD, rumah asap, pabrik pengolahan milik swasta, perusahaan pengangkutan, asosiasi pemasaran, kantor pemasaran, tempat lelang/buesa karet, eksportir, importir dan lain-lain. Panjangnya rantai pemasaran ini menyebabkan banyak pihak yang berperan. Permasalahan tata niaga karet alam lebih terasa pada perkebunan rakyat karena para petani karet mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam transaksi yang dilakukan di sentra-sentra produksi karet rakyat.

Pengembangan agribisnis karet menjadi perlu dengan asumsi eksternal a) permintaan karet dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak, semakin mahal harga karet sintetis dan kesadaran kelestarian lingkungan semakin meningkat, b) produksi karet rakyat diperkirakan semakin meningkat sementara Indonesia salah satu produsen terbesar karet, c) selain produksi lateks, kayu karet juga berpotensi untuk dikembangkan.

Identifikasi saluran pemasaran

Kelembagaan tradisional dalam sistem pemasaran bokar merupakan kelembagaan yang telah lama berkembang di sentra-sentra

produksi karet rakyat. Kelembagaan ini berkembang seiring dengan berkembangnya perkebunan karet rakyat. Pedagang perantara memegang peranan yang sangat dominan dalam kelembagaan ini. Pusat-pusat produksi karet rakyat yang lokasinya sampai ke pelosok perdesaan terpencil dihubungkan oleh pedagang perantara ini dengan pusat-pusat pengolahan (pabrik pengolahan) yang berada di sekitar Kabupaten Balangan. Antara pusat pengolahan dan sentra produksi bokar yang terpencil terbentuk suatu hierarki pedagang dari pedagang kecil yang dapat menjangkau sampai ke perkebunan, selanjutnya pedagang kecil menjual ke pedagang besar yang ada di kecamatan, dan kabupaten, dan akhirnya sampai di pabrik pengolahan.

Dalam sistem pemasaran bokar, awalnya hanya dikenal kelembagaan ini sehingga 100% bokar yang diproduksi petani dapat dikatakan ditransaksikan melalui kelembagaan ini. Kelembagaan tata niaga lain baru muncul setelah adanya proyek-proyek pengembangan karet rakyat yang dikenal dengan Gabungan Kelompok Tani Karet. Hingga saat ini kelembagaan tradisional masih memiliki peran yang dominan dalam tata niaga bokar di Kabupaten Balangan. Kelembagaan tradisional dalam tata niaga bokar telah banyak mengalami pergeseran, baik dalam hal hubungan antara pedagang dan petani maupun praktik-praktik transaksinya. Pada lokasi yang relatif terpencil dengan sarana komunikasi dan transportasi yang masih terbatas, biasanya hanya ada satu atau dua pedagang bokar yang melakukan transaksi. Pedagang ini pada umumnya juga memiliki usaha lain, seperti penyediaan bahan pokok sehingga secara umum memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan masyarakat desa pada umumnya.

Dengan demikian, hubungan antara pedagang dan petani tidak terbatas pada transaksi bokar, tetapi juga menyangkut kebutuhan pokok dan pinjaman uang pada saat petani membutuhkan. Pada hakekatnya transaksi yang terjadi secara simultan ini adalah upaya memperkecil biaya transaksi dan sekaligus memperkecil risiko bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Sifat produksi karet yang sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim menyebabkan pada saat tertentu petani sama sekali tidak bisa menyadap sehingga tidak memperoleh pendapatan. Dalam keadaan demikian maka petani akan menggantungkan kebutuhan

hidupnya kepada pedagang bokar, baik dalam bentuk kebutuhan pokok maupun pinjaman uang. Sebagai imbalan atas bantuan tersebut, petani akan menjual seluruh bokar yang dihasilkan kepada pedagang sehingga terbentuk suatu ikatan secara informal yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam bentuk hubungan prinsipal-agen.

Selalu ada anggapan bahwa harga yang ditetapkan pedagang sangat rendah sehingga petani dirugikan. Namun, pedagang sebagai agen juga menanggung risiko, misalnya berupa kemungkinan tidak kembalinya pinjaman yang diberikan kepada petani walaupun persentasenya kecil. Di pihak lain, petani sebagai prinsipal tampaknya tidak semata-mata memandang pada harga bokar yang akan diterima, tetapi pada kemudahan prosedur mendapatkan bantuan di saat memerlukan serta faktor keamanan keberlangsungan kehidupannya sehingga pada kondisi demikian kedua belah pihak merasa memperoleh manfaat dari bentuk hubungan tersebut.

Sehingga diketahui bahwa karet yang dihasilkan petani dijual ke pengepul. Pengepul terdiri dari pengepul kecil, pengepul menengah dan pengepul besar. Dari pengepul besar karet kemudian dijual ke pabrik. Rantai yang bertingkat ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan harga jual karet ditingkat petani menjadi semakin murah, di samping faktor lain misalnya kualitas karet yang dijual.

Komponen Biaya

Petani tidak melakukan identifikasi, dokumentasi maupun pencatatan biaya dan akuntansi secara khusus, sehingga tidak diperoleh catatan ataupun pembukuan tentang akuntansi mengenai karet, namun petani secara praktis memang sudah hafal mengenai komponen-komponen biaya yang mereka keluarkan. Berdasarkan hasil wawancara, maka dilakukan identifikasi biaya-biaya yang dibutuhkan petani dalam mengelola kebun karet sampai mereka menyadap dan menjual karet ke pedagang pengumpul.

Biaya Pokok

Dalam perkebunan karet, terdapat biaya pokok dan biaya operasional. Biaya pokok adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum tanaman karet menghasilkan. Biaya-biaya tersebut seperti biaya pembelian tanah dan biaya pembukaan hutan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan serta biaya lainnya.

Sebelum tanaman karet ditanam hingga berproduksi diperlukan biaya-biaya,

diantaranya adalah biaya pembukaan hutan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan sebelum menghasilkan, dan biaya lain. Biaya itu disebut sebagai biaya pokok. Sedangkan biaya operasional adalah biaya sadap, biaya perawatan, biaya pemrosesan dan biaya pengelolaan.

Biaya Operasional

Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan pada saat karet mulai menghasilkan, seperti biaya sadap, biaya perawatan, biaya pemrosesan, dan biaya pengolahan. Dalam perhitungan biaya disertakan pula biaya tenaga kerja, sarana dan prasarana, termasuk didalamnya biaya investasi modal

Harga Pokok Produksi

Secara konseptual, dalam perhitungan harga pokok produksi, biaya yang dikeluarkan terdiri dari :

1. Biaya bahan baku (*raw materials cost*),
Biaya bahan baku (*raw materials cost*) adalah biaya yang digunakan untuk bahan-bahan yang bisa dengan mudah dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi. Contoh bahan baku adalah biaya bibit karet.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor Cost*)
Definisi Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi atau bisa dihubungkan langsung dengan barang jadi. Contoh tenaga kerja langsung adalah upah sadap karet.
3. Biaya Overhead Pabrik (*Overhead Cost*)
Pengertian Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Jadi biaya ini tidak dapat diidentifikasi langsung dengan barang yang dihasilkan. Contoh Biaya overhead pabrik adalah:

1. Bahan pembantu, sering juga disebut dengan bahan tidak langsung (*indirect materials*). Contohnya: pisau sadap, mangkuk penampungan karet.
2. Tenaga kerja tidak langsung (*indirect labor*), adalah tenaga kerja yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan barang yang dihasilkan dengan tugas atau pekerjaannya. Contohnya upah pengawas/mandor.

Perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani karet disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Biaya Produksi Petani Karet (dalam Ha per tahun)

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
A ALOKASI BIAYA BAHAN BAKU		
1	Bibit Karet (termasuk penanaman)	15.000.000,00
	Umur karet : 25 tahun	600.000,00
	JUMLAH BIAYA BAHAN BAKU	600.000,00
B BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG		
1	Upah Penyemprotan/Pemupukan	280.000,00
2	Upah Sadap	720.000,00
	JUMLAH BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG	1.000.000,00
D BIAYA OVERHEAD		
Bahan Pembantu		
1	Pupuk	637.500,00
2	Obat Semprot	1.200.000,00
3	Pisau Sadap	160.000,00
4	Mangkuk penampungan	850.000,00
5	Perlengkapan penyadapan lainnya	100.000,00
6	Pembekuan karet (Deorub)	84.000,00
	Jumlah Biaya Bahan Pembantu	3.031.500,00
Tenaga Kerja Tidak Langsung		
1	Upah harian lapangan	2.400.000,00
	Jumlah Tenaga Kerja Tidak Langsung	2.400.000,00
	JUMLAH BIAYA OVERHEAD	5.431.500,00
E TOTAL BIAYA		
	Produktivitas karet	917,00
	Biaya Produksi / kg	7.667,94

Berdasarkan harga pokok produksi karet yang sudah diperoleh, dapat ditentukan harga jual yang layak dengan margin keuntungan yang diharapkan oleh petani. Berikut ini merupakan skenario harga jual yang bisa menjadi panduan bagi petani dalam menjual hasil karetinya.

Tabel 6. Perhitungan Harga Jual Karet Per Kg Dengan Pilihan Margin Keuntungan Bagi Petani

KETERANGAN		JUMLAH (Rp)		
HARGA POKOK PRODUKSI		7.667,94		
MARGIN KEUNTUNGAN		HARGA JUAL		
5%	X	8.071,57	403,6	8.071,57
10%		8.520,00	76,79	8.520,00
15%		9.021,17	1.150,19	9.021,17
20%		9.585,00	1.533,59	9.585,00
25%		10.224,00	1.916,98	10.224,00

Berikut ini merupakan perkembangan harga karet selama tahun 2017 dari bulan januari sampai dengan bulan agustus.

Tabel 7. Perkembangan Harga Karet Tingkat Petani dan Tingkat Pabrik Tahun 2017 di Kabupaten balangan (dalam Rp)

BULAN	DESA KERUH	DESA MINDUIN	DESA LALAYAU	DESA SUNGAI PUMPUNG	DESA MUARA NINIAN	RATA-RATA
JAN	10.596	11.438	9.167	8.567	8.850	9.723
FEB	11.565	13.450	10.000	9.100	8.933	10.610
MAR	10.525	9.700	9.075	7.500	8.500	9.060
APR	9.260	8.850	6.900	6.300	7.000	7.662
MEI	8.083	7.875	6.575	5.660	6.000	6.839
JUNI	8.417	8.000	6.325	5.300	6.000	6.808
JULI	7.983	8.500	6.175	5.500	6.100	6.852
AGUSTUS	7.869	na.	6.300	5.500	6.100	6.442
RATA-RATA	9.287	9.688	7.565	6.678	7.185	7.999

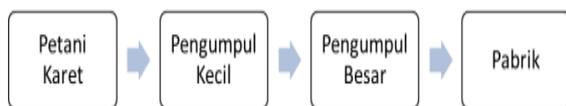
Sumber: Dinas Pertanian 2017

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa harga penjualan karet mengalami penurunan dari awal tahun sampai dengan bulan agustus 2017. Bahkan ada desa yang menjual karetinya pada harga terendah yaitu Rp.5.300,- / kg. Sementara hasil perhitungan harga pokok produksi menunjukkan biaya produksi karet petani sebesar Rp.7.667,94 / kg.

Jadi harga jual petani ada yang masih berada dibawah dari harga pokoknya. Tentu saja ini merugikan petani karet. Dari tabel diketahui bahwa harga jual masih lebih besar dari harga pokok pada 3 (tiga) bulan pertama, kemudian bergerak turun sampai dengan bulan Agustus. Penurunan harga karet merupakan masalah yang harus mendapat perhatian khusus, terutama pemerintah daerah. Dibutuhkan solusi bersama dalam upaya mempertahankan kestabilan harga jual karet rakyat agar berada pada level di atas harga pokoknya.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian kepada sektor usaha perkebunan karet dengan lebih menitikberatkan kepada kepentingan petani karet. Berdasarkan data dan pembahasan, petani karet akan mengalami kerugian jika harga terus mengalami penurunan. Jika petani menjual di bawah harga pokoknya, maka akan mengurangi kesejahteraan petani. Kondisi ekonomis petani di lapangan, petani sering menghadapi kesulitan keuangan dan sering meminjam uang kepada pengumpul dan karena hubungan semacam ini, petani memiliki ikatan emosional yang membuat mereka sudah semestinya menjual kepada pengumpul tersebut walaupun harga murah pada saat itu. Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan mendirikan koperasi. Sehingga petani jika mengalami kesulitan keuangan, bisa meminjam ke koperasi.

Jalur distribusi karet yang bertingkat juga mempengaruhi pergerakan harga karet. Dari petani menjual ke pengumpul kecil, lalu dari pengumpul kecil ke pengumpul besar dan kemudian di jual ke pabrik.



Gambar 2. Rantai Penjualan Karet

Rantai yang bertingkat ini juga memiliki pengaruh dalam perubahan harga karet, jika pabrik sudah mematok harga karet dalam membeli dengan dasar harga karet di pasar dunia, maka otomatis pengumpul akan mematok harga juga ke petani dengan margin keuntungan tertentu. Semakin panjang rantainya akan membuat hulunya menjadi semakin murah. Jika memang memungkinkan dan layak, bisa dipertimbangkan didirikan sebuah perusahaan daerah yang membeli karet dari petani di wilayah Kabupaten Balangan.

8. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani karet tidak melakukan pencatatan maupun pembukuan secara akuntansi, karena mereka tidak memiliki pemahaman dalam pencatatan akuntansi serta lebih fokus kepada melakukan pekerjaan sehari-hari mengelola kebun karet.
2. Petani menjual karetnya mengikuti harga yang ada dipasaran. Jika harga karet murah, petani tetap akan menjualnya, petani tidak bisa menahan barang untuk menunggu kenaikan harga karena jika menahan lebih lama karet akan menjadi susut dan juga berampak merugikan petani.
3. Perhitungan harga pokok produksi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan karet adalah Rp.7.667,94/kg. Perkembangan harga mengalami penurunan pada tahun 2017 dari harga tertinggi sebesar Rp. 13.450,00/kg, menurun bahkan sampai harga terendah Rp 5.300,00/kg.

9. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan dari penelitian ini, dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi petani karet, disarankan agar meningkatkan kualitas karet yang diproduksi, misalnya dimulai dengan memilih bibit yang unggul, mengolah karet dengan prosedur yang disarankan contohnya menggunakan pembeku deorub dalam membekukan karet, tidak menggunakan pupuk.
2. Dibutuhkan perhatian dari pemerintah agar mencari solusi terkait harga karet. Supaya petani tidak dirugikan dalam menjual karet di bawah biaya yang mereka keluarkan.
3. Saran kepada Pemerintah Daerah yaitu dengan memberikan fasilitasi berupa pendirian koperasi khusus petani karet. Dari koperasi yang dibentuk, petani bisa bermanfaat bagi petani, misalnya petani bisa memperoleh pinjaman lunak kepada koperasi. Bahkan, jika memang memungkinkan, bisa dipertimbangkan untuk mendirikan perusahaan daerah yang menerima/membeli karet yang diproduksi oleh petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-Dag/Per/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang diperdagangkan, Kementerian Perdagangan RI, Jakarta.
- Anonimous, 2008. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permenta/OT.140/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Balangan dalam angka 2016, Banjarmasin Kalsel.
- Fatihah, N. Binti., RE & Hidayat, AS., 2016. *Analisis Komponen Harga Pokok Produksi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Wilayah Kalimantan Selatan Banjarmasin*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Hansen and Mowen, 2000, 2006, *Manajemen Biaya, Akuntansi dan Pengendalian*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 2000, 2005, 2007, *Akuntansi Biaya*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Mursyidi, 2010, *Akuntansi Biaya-convensional costing, just in time, dan activity based costing*. Refika Aditama, Bandung.
- McMillan, James H. & Sally Schumacher. 2001. *Research in education a Conceptual Introduction. 5th Ed.* New York: Addison Wesley Longman Inc.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi Pertama, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Pearce II, John A and Richard B Robinson. 2009, *Strategic Management-Formulation, Implementation and Control*. Mc Graw Hill International Edition. USA.
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Siregar, Baldrick, dkk, 2013, *Akuntansi Biaya*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso S.R. 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1, Edisi 5 (revisi). Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Akuntansi Biaya*, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, Ekonisia, Yogyakarta.
- Sutrisno, 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Wardhana dkk, 2011, *Evaluasi Produk Karet Rakyat*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007).